

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat

Pelabuhan Perikanan Nusantara terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka mendukung Visi Kementerian dan Perikanan yaitu “Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Misi yang diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.50 Sungailiat, Bangka

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah- langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam

pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat adalah sebagai berikut

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara

jas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan untuk membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/ BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

(6) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

(7) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(8) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(9) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berdasarkan
Akuntansi
Pertama
kali

(11) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan beberapa kali revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

URAIAN	Anggaran	Anggaran setelah revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	712,599,000	1,026,985,205
Jumlah Pendapatan	712,599,000	1,026,985,205
Belanja		
Belanja Pegawai	5,928,720,000	5,810,945,679
Belanja Barang	5,210,881,000	4,739,936,790
Belanja Modal	61,710,000	61,709,997
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah	11,201,311,000	10,612,592,466

Realisasi
Pendapatan
Rp.
1,026,985,205

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1,026,985,205,- atau mencapai 144,12% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 712,599,000,-. Pendapatan (PNBP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat terdiri dari Pendapatan Sewa tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan, Pendapatan Jasa Lainnya, dan Penerimaan Kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, dengan Rincian Estimasi dan Realisasi sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan PNBP Lainnya			
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)	26,357,000	330,828,875	1255,18

- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151)	189,942,000	226,675,602	119,34
- Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan (425621)	496,300,000	469,264,256	94,55
- Pendapatan Jasa Lainnya (425699)	0	0	0
- Pendapatan Anggaran Lainnya (425699)	0	0	0
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	0	0	0
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811)	0	0	0
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)		216,472	0
Jumlah	712,599,000	1,026,985,205	144,12

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.026.985.205	901.506.920	13,92
Jumlah	1,026,985,205	901.506.920	13,92

*Realisasi
Belanja Negara
Rp.
10,612,592,466*

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat Semester II Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 10,612,592,466,- atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp. 11,201,311,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	5.928.720.000	5.811.130.786	98,02
Belanja Barang	5.210.881.000	4.739.936.790	90,96
Belanja Modal	61.710.000	61.709.997	100,00
Total Belanja Kotor	11.201.311.000	10.612.777.573	94,75
Pengembalian Belanja		185.107	0
Belanja Netto	11,201,311,000	10,612,592,466	94,75

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	%
Belanja Pegawai	5.811.130.786	5.615.586.687	3,48
Belanja Barang	4.739.936.790	6.456.230.377	-26,58
Belanja Modal	61.709.997	982.871.005	-93,72
Total Belanja Kotor	10.612.777.573	13.054.688.069	-18,71
Pengembalian Belanja	185.107	-	0
Belanja Netto	10.612.592.466	13.054.688.069	-18,71

Belanja Pegawai

Rp

5,811,130,786

,-

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5,811,130,786,- atau sebesar 98,01% mengalami kenaikan sebesar 3,48 % dibandingkan dengan TA. 2024. Hal ini disebabkan adanya penambahan pegawai PPPK sebanyak 20 orang pegawai mulai dari Bulan Oktober 2025;

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.712.703.858	1.849.390.000	-7,39
Belanja Gaji daji dan Tunjangan PPPK	1.337.148.402	1.057.703.131	26,42
Belanja Lembur	2.490.000	18.300.000	-86,39
Belanja Tunjangan Kinerja	2.758.603.419	2.691.156.505	2,51
Jumlah Belanja	5.810.945.679	5.615.588.242	3,48
Pengembalian Belanja Pegawai	185.107	1.555	11803,99
Jumlah Belanja	5.811.130.786	5.615.586.687	3,48

B.4. Belanja Barang

Belanja

Barang Rp.

10,328,194,89

1,-

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp 10,328,194,891,- dan Rp 6.456.230.377,- atau mengalami Kenaikan sebesar 59,97%. Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA. 2025 mengalami penurunan

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA. 2025 dan 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
Belanja Barang operasional	990.299.739	1.377.438.645	-28,11
Belanja barang non operasional	11.997.000	204.406.705	-94,13
Belanja barang persediaan	14.570.914	148.124.720	-90,16
Belanja jasa	2.528.919.460	2.696.601.806	-6,22

Belanja pemeliharaan	965.358.535	1.322.949.174	-27,03
Belanja perjalanan	6.103.564	706.709.327	-99,14
Jumlah Belanja Kotor	10.328.379.998	6.456.230.377	59,98
Pengembalian Belanja	185.107	0	0
Jumlah Belanja	10.328.194.891	6.456.230.377	59,97

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal

Rp.

61,709,997,-

Realisasi Belanja Modal pertanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 61,709,997,- dan Rp 982.871.005,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal pada TA. 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan TA. 2024 hal ini disebabkan karena adanya efesiensi anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
Belanja modal peralatan dan mesin	61.709.997	496.486.000	-87,57
Belanja modal gedung dan bangunan	0	42.102.000	0
Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan	0	444.283.005	0
Jumlah Belanja Kotor	61.709.997	982.871.005	-93,72
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja	61,709,997	982.871.005	-93,72

Penjelasan rincian belanja modal adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari :

- Laptop 4 unit Rp 42.199.998,-
- Personal komputer lainnya Rp 14.310.003,-
- Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Unit Rp 5.199.996,-

C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA

Belanja

Modal Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0 ,-yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang masih digunakan pada tahun berjalan. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang kas di bendahara Pengeluaran :
- tidak ada saldo kas di bendahara pengeluaran

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas di bendahara penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Pemerintah

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak ada saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Jumlah tersebut terdiri dari:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
LS Bendahara	-	-
Jumlah	-	-

C.4. Belanja dibayar dimuka (prepaid)

Saldo Belanja dibayar dimuka (prepaid) pertanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya. Rincian belanja dibayar dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar dimuka

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Beban pegawai dibayar dimuka (prepaid)	-	-
Beban barang yang dibayar dimuka (prepaid)		
Jumlah	-	-

C.5. Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo uang muka belanja pertanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian uang muka belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian uang muka belanja (prepayment)

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

C.6. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pertanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp. 590,500,- dan Rp. 1.256.250. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan dimasa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan yang Masih Harus diterima

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	590,500	1.256.250
Jumlah	590,500	1.256.250

C.7. Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 1,295,183 dan Rp.0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak

Keterangan	TA. 2025	TA. 2024
Piutang Penerimaan Negara Bukan pajak	1,295,183	0
Piutang Lainnya		
Bagian Lancar taguhan Tuntutan Ganti Rugi		
Jumlah	1,295,183	0

C.8 Penyisihan piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek pertanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. (6,476) dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka

Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	(6,476)
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		(6,476)
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		(6,476)

C.9. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp. 46,898,297 ,- dan Rp. 62,444,674 ,- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
Barang Konsumsi	46,898,297	62.444.674	133,15
Barang untuk Pemeliharaan			
Suku Cadang			
Pita, Matterai dan Leges			
Bahan Baku			
Persediaan Lainnya			
Jumlah Belanja	46,898,297	62.444.674	133,15

C.10. Persediaan yang Belum diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister pertanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak ada nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

Debitur	TA. 2025	TA. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Piutang Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TH. 2025	TH 2024
	Jumlah	-	-

C.13 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya pertanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per unit masing-masing debitur sebagai berikut :

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya

No	URAIAN	TH. 2025	TH 2024
	Piutang jangka Panjang lainnya		
Jumlah		-	-

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.15 Tanah

Tanah
Rp.136.832.798
.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.136.832.798.000 dan Rp136.832.798.000. Nilai tanah tersebut tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	136.832.798.000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	136,832,798,000

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Kode Barang	NUP	Luas	TA. 2025
1	2.01.01.02.008	1	32.200 m2	Rp 10.938.254.000
2	2.01.02.02.002	1	416.901 m2	Rp 125.894.544.000
Jumlah				Rp 136.832.798.000

Untuk tanah yang berukuran 32.200 m2 telah bersertifikat Nomor : B 2387968 dengan Kode Barang Lap.SIMAK BMN No. 2.01.01.02.008 namun untuk tanah yang berukuran 416.900 m2 telah bersertifikat dengan Nomor : AAR603771 dan Nomor : AAR603772 Kode Barang Lap SIMAK BMN No. 2.01.02.02.002. Nilai Aset Tanah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp.136.832.798.000,-

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 17,461,752,508,- dan Rp. 17,400,042,511,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	17.400.042.511
Mutasi Tambah :	
Pembelian	61.709.997
Transfer Masuk	-
Reklasifikasi Masuk	-
Jumlah	61.709.997
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Penghapusan barang	-
Jumlah	-
Saldo per 31 Desember 2025	17,461,752,508

Penjelasan Pembelian barang berupa peralatan dan mesin sebagai berikut:

1. Laptop 4 unit Rp 42.199.996,-
2. Personel komputer lainnya Rp 14.310.003,-
3. Printer (Peralatan Personal Komputer) 2 Unit Rp 5.199.996,-

C.17 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan Rp.
19,654,769,009,-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah Rp. 19,654,769,009,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	19,202,917,009
Mutasi Tambah :	
Pembelian	
Transfer Masuk	451,852,000
Reklasifikasi Masuk	
Jumlah	
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset dari Penggunaan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi keluar	
Koreksi Pencatatan	-
Penghapusan barang	-
Jumlah	
Saldo per 31 Desember 2025	19,654,769,009

Penjelasan Transfer Masuk berupa Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

1. Bangunan gedung tertutup permanen Rp 148.685.000,-
2. Gedung pos jaga permanen Rp 1.037.000,-
3. Gedung pos jaga semi permanen Rp 1.037.000,-
4. Gedung garasi pool semi permanen Rp 116.331.000,-
5. Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen Rp 2.760.000,-
6. Rumah negara gol I tipe A permanen Rp 544.220.000,-
7. Rumah negara gol I tipe C permanen Rp 353.030.000,-
8. Rumah negara gol I tipe D permanen Rp 573.570.000,-
9. Rumah negara gol II tipe B permanen Rp 382.380.000,-

C.18 Jalan jembatan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan jembatan,
Irigasi dan Jaringan
Rp29,112,089,597,-*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 29,112,089,597.- Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Jalan jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	27,519,587,640
Mutasi Tambah :	
Pembelian	
Transfer Masuk	1,592,501,957
Reklasifikasi Masuk	
Pengembangan Melalui KDP	
Jumlah	1,592,501,957
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset dari Penggunaan	
Transfer Keluar	
Reklasifikasi keluar	
Koreksi Pencatatan	
Penghapusan barang	
Jumlah	
Saldo per 31 Desember 2025	29,112,089,597

Penjelasan transfer masuk berupa Jaringan sebagai berikut:

Instalasi air bersih / air baku lainnya Rp 1.592.501.957,-

C.19 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya Rp.
404.740.000

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 404.740.000 dan Rp. 404.740.000. Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	404.740.000
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 31 Desember 2025	404.740.000-
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	404.740.000

C.20 Aset tetap yang Belum Diregister

Aset Tetap yang
Belum
Diregister Rp.0

Saldo Aset tetap yang belum diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing Rp.0 dan Rp.0

C.20 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
(KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada saldo KDP Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 31 Desember 2024	-

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan
Aset tetap
Rp30.523.188.478,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah Rp. 30.523.188.478 ,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	136.832.798.000	0	136.832.798.000
2	Peralatan dan Mesin	17.400.042.511	16.690.827.469	16.690.827.469
3	Gedung dan Bangunan	19.202.917.009	3.205.817.994	22.408.735.003
4	Jalan dan Jembatan	14.935.574.800	3.563.782.723	40.908.092.526
5	Irigasi	4.805.367.685	3.973.213.868	8.778.581.553
6	Jaringan	7.778.645.155	3.089.546.424	10.868.191.579
6	Konstruksi dalam pengerjaan			0
Akumulasi Penyusutan			30.523.188.478	

C. Properti
investasi Rp.
4,516,276,404,-

C.20 Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya . Saldo aset Properti Investasi adalah Rp. 4,516,276,404,-

Aset Lain-
Lain Rp.0

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 10,128,202,451 dan Rp. 8,855,009,451 ,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi di gunakan dalam operasionalentitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	10,128,202,451
Mutasi tambah:	-
Penambahan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
Pengurangan Nilai Aset	-
Saldo per 31 Desember 2025	10,128,202,451
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1,273,193,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8,855,009,451

Uang Muka
dari KPPN
Rp.0

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN

Uraian	TA. 2025	TA. 2024
Uang Persediaan	-	-
Tambahan Uang Persediaan		
Jumlah	-	-

C.24. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.144.500.00
0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah Rp173,960,827,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian sebagai berikut :

Rincian Utang kpada pihak Ketiga

Uraian	TA. 2025	TA. 2024
Utang kepada pihak Ketiga lainnya	173,960,827	114.500.000
Jumlah	173,960,827	114.500.000

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Tidak ada kenaikan realisasi pada tahun 2025 dikarenakan adanya tagihan outsourcing petugas keamanan periode bulan desember 2025 yang masuk dalam katagore pembayaran RPATA.

*Pendapatan
Diterima Di Muka
Rp3,28,747,395,-*

C.25. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka untuk periode per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebanyak Rp. 328,747,395,- dan Rp114.396.832,- adalah yang merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

Pendapatan diterima Dimuka

Uraian	TA. 2025	TA. 2024
Pendapatan Diterima Dimuka	328,747,395	114.396.832
Jumlah	328,747,395	114.396.832

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut :

Ada kenaikan Pendapatan Diterima Dimuka pada periode per 31 Desember 2025 adalah adanya penambahan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi yaitu merupakan transaksi penggunaan dan pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan atas 71 pengguna jasa.

*Ekuitas
Rp175,453,519,917,-*

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 175,453,519,917,- dan Rp. 175,908,945,991,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP Rp

1,026,985,205

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 1,026,985,205,- dan Rp. 901.506.920,- Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11.93%, hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi. Rincian pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	330.828.875	33.738.899	880,56
Pendapatan Penggunaan Sarpras sesuai Tusi	226.675.602	195.568.900	15,91
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	469.264.256	581.669.660	-19,32
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
Pendapatan Anggaran lainnya	0	88.200.000	-100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	0	833.420	-100,00
Pendapatan Penerimaan pengembalian belanja TAYL	216.472	1.496.041	-85,53
Jumlah	1.026.985.205	901.506.920	13,92

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp.

5.807.980.496

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.5.807.980.496,- dan Rp.5.615.586.687,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 11.93% dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena adanya penambahan 20 orang pegawai PPPK Rincian Beban Pegawai Semester II adalah sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.162.537.620	1.265.397.900	-8,13
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.447	19.987	-7,71
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	84.149.780	90.803.480	-7,33
Beban Tunj. Anak PNS	25.054.044	26.907.980	-6,89
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	143.120.000	154.760.000	-7,52

Beban Tunj. PPh PNS	10.767.597	12.264.478	-12,21
Beban Tunj. Beras PNS	65.250.420	71.333.700	-8,53
Beban Uang Makan PNS	186.486.000	188.325.000	-0,98
Beban Tunj. Umum PNS	10.119.950	13.415.000	-24,56
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	886.396.900	709.319.600	24,96
Beban Pembulatan Gaji PPPK	16.470	11.681	41,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	65.209.060	48.564.340	34,27
Beban Tunjangan Anak PPPK	16.807.532	10.609.876	58,41
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	105.880.000	102.080.000	3,72
Beban Tunjangan Beras PPPK	60.253.440	43.307.160	39,13
Beban Uang Makan PPPK	192.820.000	143.810.000	34,08
Beban Uang Lembur	9.765.000	8.727.000	11,89
Beban Pegawai Tunjangan Khusus	1.582.334.196	1.742.948.950	-9,22
Beban Pegawai Tunjangan Khusus Kinerj PPPK	1.175.794.040	948.207.555	24,00
Jumlah	5.807.980.496	5.615.586.687	3,43

Beban

Persediaan Rp

30,117,291

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.30,117,291,- dan Rp. 42.668.667,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan TA. 2025 dan 2024

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	30.117.291	126.108.733	-76,12
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	30,117,291	126,108,733	-76,12

Beban Jasa

Rp. 3,606,179,918

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 3,606,179,918,- dan Rp. 4.426.571.876,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Jasa untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2025

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	903.916.339	1.296.942.665	-30,30
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.363.400	5.861.980	-76,74
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	85.020.000	74.634.000	13,92
Beban Bahan	51.326.130	180.506.705	-71,57
Beban Honor Ouput Kegiatan	680.000	12.900.000	-94,73
Beban Barang Non Operasional Lainnya	11.317.000	11.000.000	2,88
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	148.124.720	-100,00
Beban Langganan Listrik	350.153.866	474.369.834	-26,19
Beban Langganan Telphon	100.346.077	132.397.670	-24,21
Beban Langganan Air	20.398.109	18.428.361	10,69
Beban Jasa profesi	0	0	0
Beban Jasa lainnya	2.081.658.997	2.071.405.941	0,49
Jumlah Belanja	3.606.179.918	4.426.571.876	-18,53

Beban

Pemeliharaan Rp

965.358.535

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 965.358.535,- dan Rp. 1.322.949.174,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	432.501.090	586.528.242	-26,26
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	0	0	0
Beban Pemeliharaan Perlalatan dan Mesin	264.709.195	438.481.867	-39,63
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	189.950.000	138.343.375	37,30
Beban Pemeliharaan Jaringan	78.198.250	159.595.690	-51,00
Jumlah Belanja	965.358.535	1.322.949.174	-27,03

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Rp. 177.200.012

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan tahun 2024 adalah masing masing sebesar Rp. 177.200.012,- dan .Rp. 653.447.428- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 46.34% dikarenakan adanya pematasan terkait perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA. 2025 dan 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	164.477.741	315.533.445	-47,87
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	6.300.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	19.650.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.722.271	311.963.983	-95,92
Jumlah Belanja	177.200.012	653.447.428	-72,88

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat

Rp0

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA.2025. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2021. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.8. Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial selama periode TA 2025. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp. 1.780.063.426,- dan Rp.1.013.976.766,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	%
Beban Penyusutan Perlalatan dan Mesin	235.431.271	221.405.720	6,33
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	444.946.985	189.051.610	135,36
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	309.473.873	154.736.936	100,00
Beban Penyusutan Irigasi	360.566.670	199.734.697	80,52
Beban Penyusutan Jaringan	270.580.460	122.019.374	121,75
Beban Penyusutan Properti Investasi	155.840.430	92.442.763	68,58
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	3.223.737	34.585.666	-90,68
Jumlah Belanja	1.780.063.426	1.013.976.766	75,55

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih Rp0

Tidak ada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak ada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Beban PenyisihanPiutangTakTertagih - PiutangJkPendek	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PiutangJkPanjang	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Lain-lain Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Tidak ada Beban Lain-lain untuk TA 2025. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2025

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-
Beban AsetExtrakomtabelPeralatandanMesin	-	-
Beban AsetExtrakomtabelGedungdanBangunan	-	-
Beban AsetExtrakomtabelAsetTetapLainnya	-	-
Jumlah	-	-

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsientitas. Surplus/Defisitdari Kegiatan Non Operasional TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasioanal

URAIAN	TA 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-
Surplus PenjualanAset Non Lancar	-	-
PenjualanAlatAngkutDarat	-	-
DefisitPenjualanAset Non Lancar	-	-
PenjualanAlat Kantor	-	-
DefisitSelisihKurs	-	-
Surplus (Defisit) dariKegiatan Non Operasional	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.13. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiridari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA. 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2025

URAIAN	TA 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-
Pendapatan PNBp	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-
Beban Persediaan	-	-
Belanja Modal BLU	-	-
Jumlah	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp 175,908,945,991

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 175,908,945,991,- dan Rp. 176.884.065.967,-

Defisit LO

Rp(11,557,420,786
)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(11,556,823,734) dan Rp(13,341,348,340) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Persediaan

Rp(0)

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp.0

Koreksi yang

menambah/mengurangi
ekuitas Rp.135.317.382

E.4 Koreksi yang menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 3,510,591,- dan Rp123,451,174

Penyesuaian Nilai Aset

Rp.0

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian nilai aset Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan 0. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan

Rp.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan 0.

Koreksi Atas

Reklasifikasi Rp.

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0. Koreksi Atas reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya.

Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi

Jenis Koreksi	TA. 2025
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp.0. Revaluasi tersebut berasal dari selisih

Selisih Revaluasi Aset Rp. 0

realuasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan.

Jenis Aset	TA. 2025
Koreksi Lainnya	-
Revaluasi Aset tetap	
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 3,510,591

Koreksi Aset Non Revaluasi
Rp. 3,510,591

Jenis Koreksi tetap Non revaluasi	TA. 2025
Koreksi Nilai Persediaan	3,510,591
Jumlah	3,510,591

E.4.6 Koreksi lain Lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan 0. Koreksi Lain lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah koreksi lain-lain terdiri dari:

Koreksi lain-lain Rp.0

Jenis Koreksi	TA. 2025
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Transaksi antar
entitas Rp.
11.639.577.671

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.639.577.671,- dan Rp. 13.956.194.989,- Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN, terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas	TAHUN 2025	TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Diterima dari Entitas Lain	1.026.985.205	13.054.688.069	-92,13
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.612.592.466	(901.506.920)	-1277,21
Transfer Masuk	-	-	
Transfer Keluar	-	-	

Pengesahan Hibah Langsung			
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung			
Jumlah	11.639.577.671	13.956.194.989	-16,60

Ekuitas Akhir

Rp175,453,519,917

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 175,454,333,441,- dan Rp. 175,908,945,991,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pada tahun 2025 PPN Sungailiat telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran dan kinerja meliputi antara lain :
 - Telah melakukan Revisi I DIPA/RKAKL pada tanggal 23 Januari 2025 terkait revisi POK dan administrasi. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi Kanwil Pangkalpinang).
 - Telah melakukan Revisi II DIPA/RKAKL pada tanggal 24 Februari 2025 terkait pagu blokir alokasi adjustment (AA). Revisi dilakukan oleh Eselon 1 (Revisi DJA)
 - Telah melakukan Revisi III DIPA/RKAKL pada tanggal 28 Februari 2025 terkait revisi POK, administrasi, dan update halaman III DIPA dengan pagu tetap. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi Kanwil Pangkalpinang).
 - Telah melakukan Revisi IV DIPA/RKAKL pada tanggal 14 April 2025 terkait revisi POK, administrasi, dan update halaman III DIPA dengan pagu tetap. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi Kanwil Pangkalpinang).
 - Telah melakukan Revisi V DIPA/RKAKL pada tanggal 23 April 2025 terkait revisi POK dan administrasi. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi KPA).
 - Telah melakukan Revisi VI DIPA/RKAKL pada tanggal 18 Juni 2025 terkait revisi POK dan administrasi. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi KPA).
 - Telah melakukan Revisi VII DIPA/RKAKL pada tanggal 14 Juli 2025 terkait revisi POK, administrasi, dan update halaman III DIPA dengan pagu tetap. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi Kanwil Pangkalpinang).
 - Telah melakukan Revisi VIII DIPA/RKAKL pada tanggal 03 September 2025 terkait revisi POK dan administrasi. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi Kanwil Pangkalpinang).
 - Telah melakukan Revisi IX DIPA/RKAKL pada tanggal 16 Oktober 2025 terkait revisi POK dan administrasi. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi KPA).
 - Telah melakukan Revisi X DIPA/RKAKL pada tanggal 20 November 2025 terkait revisi POK dan administrasi. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi Kanwil Pangkalpinang).

- Telah melakukan Revisi XI DIPA/RKAKL pada tanggal 01 Desember 2025 terkait revisi Penambahan Pagu Anggaran Belanja Gaji dari Belanja Operasional revisi POK dan adminitrasi. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi Kanwil Pangkalpinang).
- Telah melakukan Revisi XII DIPA/RKAKL pada tanggal 09 Desember 2025 terkait revisi Penambahan Pagu Anggaran Belanja Gaji dari Eselon I. Revisi dilakukan oleh Eselon 1 (Revisi DJA)
- Telah melakukan Revisi XIII DIPA/RKAKL pada tanggal 12 Desember 2025 terkait revisi POK dan adminitrasi. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi Kanwil Pangkalpinang).
- Telah melakukan Revisi XIV DIPA/RKAKL pada tanggal 18 Desember 2024 terkait revisi Penambahan Pagu Anggaran Belanja Gaji dari Belanja Operasional revisi POK dan adminitrasi. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi Kanwil Pangkalpinang).
- Telah melakukan Revisi XV DIPA/RKAKL pada tanggal 25 Desember 2024 terkait revisi POK dan adminitrasi. Revisi dilakukan oleh satker PPN Sungailiat (Revisi Kanwil Pangkalpinang)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

*Sungailiat, 30 April 2026
Kepala PPN Sungailiat*


Kurmawan